

# **Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok Pembatas Sebagai Upaya Mencegah *Illegal Immigrant & Narcotics Smuggling* Asal Meksiko (2017 - 2020)**

Aprilliana Lista Hartanto<sup>1</sup>  
Yusran<sup>2</sup>  
Syahrul Awal<sup>3</sup>

## ***Abstract***

*This paper aims to analysed the policies of President Donald Trump in the program of building a barrier wall as an effort to prevent illegal immigrants and narcotics smuggling from Mexico. In conducting the analysis of this paper, the author uses a qualitative method. In this paper, the writer finds an analysis that Donald Trump's policy in national security is the Executive Order, Memo, and Proclamation to use the President of the United States as a responsible person in an effort to prioritize his national interests and foreign policy. In addition, President Donald Trump protects his national security and national interests from attacks by transnational crimes including illegal immigrants, narcotics smuggling, terrorism and entry into the United States. President Donald Trump in his policy is Make American Great Again and America First as the ideology in his doctrine. The National Security Strategy includes increasing borders, increasing inspections, enforcing immigration laws. President Donald Trump's administration's national security strategy lays out a strategic vision for "protecting the American people, the homeland, and the American way of life" increasing prosperity, maintaining peace through strength, and advancing America's influence in the world. Donald Trump's administration's will pursue this beautiful vision of a world of strong, sovereign, and independent nations, each with its own culture and dreams, thriving in prosperity, freedom, and peace throughout the coming year.*

***Keywords:*** barrier wall, immigrant illegal, narcotics smuggling, national security

---

<sup>1</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Alamat Email: aprillianalista@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

## **Pendahuluan**

Amerika Serikat (AS) sebagai negara terbesar dengan total luas wilayah menempati peringkat ke empat di dunia. Menjadikan AS mempunyai populasi manusia cukup tinggi, begitu juga mengenai sektor ekonomi terbesar di dunia. Hal ini mengundang banyak sekali imigran untuk datang dan menetap ke AS. Imigran ilegal sebagian besar terdiri dari pengungsi El Salvador dan Honduras melakukan perjalanan melalui Meksiko dengan harapan mencapai AS (Lacatus, 2020: 41). Tidak hanya itu saja, AS merupakan destinasi populer utama bagi imigran Meksiko dikarenakan posisi kedua negara bersebelahan dan merupakan negara dengan penyumbang imigran terbesar yang dominan di AS.

Mil pertama tembok perbatasan dibangun pada 1990-an oleh Presiden Demokrat Bill Clinton. Perbatasan selatan San Diego, yang telah diidentifikasi sebagai daerah penyelundupan manusia dan perdagangan narkoba yang tinggi adalah perbatasan pertama yang dipagari. Perwakilan Republik Duncan Hunter, mantan Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR berperan penting dalam pembangunan pagar keamanan pertama (23 kilometer) di perbatasan selatan AS yang memisahkan San Diego County dan Tijuana. Tembok Presiden Clinton terbatas pada kota-kota El Paso, San Ysidro, Nogales. Tembok itu tidak menghentikan migran yang sangat miskin tetapi mengarahkan mereka kembali ke medan yang keras di Barat Daya tempat ribuan orang tewas akibat kebijakan perbatasan. Pengeboman *World Trade Center* pada 1993 memberikan dorongan dan tujuan bagi Presiden Clinton menangani imigrasi. Meskipun tidak ada orang Meksiko terlibat pengeboman tahun 1993, kebijakan perbatasan AS - Meksiko dimasukkan dalam inisiatif berfokus pada terorisme. Banyak penyelundupan alien dan teroris internasional bersembunyi di balik status imigran serta arus imigran ilegal melintasi perbatasan AS (Douglas, 2013: 204-205).

Kebijakan Bush dilatarbelakangi 9/11 oleh ancaman, pencegahan dan penahanan. AS mengirim 6.000 pasukan garda nasional untuk berpatroli di perbatasan untuk membendung imigran ilegal. Membangun pagar 700 mil di sepanjang perbatasan AS-Meksiko. Perbatasan memisahkan kedua negara panjangnya lebih dari 2.000 mil. Upaya mendirikan pagar sepanjang satu bagian hanya menggeser pergerakan imigran ilegal ke bagian lain perbatasan. Pagar di sepanjang perbatasan tidak mengurangi sekitar 40% imigran yang memasuki AS (Owens, 2008: 26).

Dalam pemerintahan Obama, Pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan telah menyelesaikan 649 dari 652 mil pagar (99,5 persen) mencakup 299 mil penghalang kendaraan dan 350 mil pagar pejalan kaki melanjutkan program tembok perbatasan dari Bush (Politifact, 2011). Pada 20 November 2014 Presiden Obama membuat program *Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents* (DAPA) menginstruksikan pejabat eksekutif melakukan kebijaksanaan administratif untuk menunda deportasi imigran tidak mempunyai dokumen dan merupakan orang tua dari warga negara AS atau penduduk menetap yang sah. DAPA mengikuti program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) pada Juni 2012 yang berfokus pada individu tidak berdokumen tiba di AS yaitu imigran anak-anak dengan kriteria dan syarat tindakan yang ditangguhkan serta memberikan setidaknya status hukum sementara (Volpp, 2016: 389).

Trump memiliki gaya kepemimpinan populis dalam kebijakan luar negerinya sehingga lebih menonjol tetapi juga lebih pribadi. Oleh karena itu pemimpin populis akan lebih terlibat secara pribadi dalam pembuatan kebijakan luar negeri dibandingkan dengan pendahulunya nonpopulis (Destradi dan Plagemann, 2019: 724). Kemapanan hari ini, sebaliknya mengambil manfaat abadi dari globalisasi yang berkelanjutan. Namun, karena tidak dapat meyakinkan publik tentang manfaat ini, banyak pemimpin dan pakar AS menggunakan kata-kata klise menyerukan "keamanan kolektif" dalam menggambarkan aliansi jarang bertindak secara kolektif dan tidak akan mengamankan aliansinya. Perbatasan selatan merupakan katekismus daripada argumen. Mengikuti poin yang lebih halus yang tidak kurang integral dengan Doktrin Trump: Waktu berubah dan kebijakan harus berubah dengannya (Anton, 2019).

Trump telah mematahkan pola dan proses pendahulunya dengan menggunakan *Executive Order* (EO) dan proklamasi untuk membuat kebijakan imigrasi baru. Misalnya, keamanan perbatasan dan EO penegakan dalam negeri keduanya menyerukan peningkatan staf dan infrastruktur (tergantung alokasi), perluasan perjanjian penegakan dalam negeri dengan polisi setempat dan peningkatan penahanan. Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di sepanjang perbatasan selatan melalui proklamasi dan meminta militer untuk membantu penegakan perbatasan. Serupa proklamasi larangan tahun 1980-an, proklamasi menanggihkan masuknya semua individu kecuali di pelabuhan masuk. Pendahulu sebelumnya tidak menetapkan prioritas penegakan imigrasi melalui EO atau proklamasi. EO Trump menetapkan kebijakan dan prioritas mengarahkan personel penegak hukum (Waslin, 2020: 63-64).

Trump telah menggunakan berbagai alat, termasuk EO, proklamasi, perubahan peraturan, memo kebijakan, memo presiden, memorandum agensi, aksi agensi dan bahkan tweet. Kebijakan imigrasinya berbahaya bagi hampir semua kategori imigran dan non-imigran, serta yang melayani dan mengadvokasi mereka. Trump menjalankan otoritas eksekutifnya tanpa banyak proses, menghindari prosedur yang sudah mapan untuk konsultasi dan mendapatkan masukan dari kongres, lembaga federal, staf Gedung Putih dan publik.

Kebijakan Trump membuat tembok pemisah mencegah imigrasi tidak sah dan perdagangan narkoba adalah pilar penting. Trump menstigmatisasi migran tidak sah dari Meksiko dan menyoroti ancaman narkoba dan kekerasan oleh kartel Meksiko selama kampanyenya (Kolås, 2021). Tembok pembatas sebagai acuan monumen keamanan nasional. Perbatasan selatan AS mengamankan pekerjaan dan tunjangan bagi warga negara Amerika. Trump menganggap keamanan perbatasan dan kontrol imigrasi yang ketat penting. Migran ilegal adalah jahat, penjahat dan ancaman langsung terhadap pekerjaan dan layanan publik yang dibayar oleh pekerja Amerika. Di dalam negeri, Trump menganggap imigrasi ilegal sebagai ancaman terhadap keamanan fisik dan ancaman langsung terhadap pekerjaan dan layanan publik yang dibayar oleh pekerja Amerika. Setelah menetap di AS, mereka kemungkinan akan mengambil pekerjaan dari warga negara Amerika dan merupakan ancaman besar bagi keamanan pekerjaan dan kekayaan pribadi orang Amerika (Lacatus, 2020: 40-41).

Trump telah mempertahankan fokus kuat karakteristik tembok selatan, istilah 'tak bisa ditembus', 'luar biasa' dan 'hebat', memunculkan kekuatan dan tekad. Tembok Selatan dibangun lebih dari 400 mil tembok perbatasan paling kuat dan canggih di dunia (White House, 2021). Pemerintahan Trump telah mempersulit banyak orang untuk memasuki AS. Hampir tidak mungkin bagi orang-orang dari negara tertentu termasuk Meksiko melakukan perjalanan ke negara itu dan pemukiman kembali pengungsi telah menurun drastis (Chishti dan Botler, 2020).

*Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok  
Pembatas Sebagai Upaya Mencegah Immigrant Illegal & Narcotics Smuggling  
Asal Meksiko (2017 - 2020)*

Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membangun tembok di perbatasan selatan dan meminta Meksiko membayarnya. Sejak menjabat, Trump telah meminta Kongres untuk mengalokasikan uang untuk tembok sebagai gantinya dan meminta Meksiko membayar AS kembali. Para pemimpin Meksiko telah secara terbuka menolak jalan apa pun untuk membayar tembok itu (CNN, 2017).

Para warga negara Meksiko tidak mendukung adanya tembok pembatas sebab itu menyerang orang Meksiko dan meninggalkan statuta kebebasan AS. Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto kembali menegaskan posisinya tidak akan membayar pembangunan tembok perbatasan yang diusulkan Presiden Donald Trump. Sebagai tanggapan, kementerian luar negeri negara itu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Meksiko tidak akan membayar untuk tembok atau penghalang fisik lainnya di perbatasan dalam keadaan apa pun. Penetapan ini bukan bagian dari strategi negosiasi Meksiko, tetapi prinsip kedaulatan dan martabat nasional. Pernyataan kementerian luar negeri Meksiko juga menanggapi komentar Trump terkait kejahatan di Meksiko. Kementerian mengatakan kejahatan itu adalah masalah bersama bagi kedua negara dan sebagian disebabkan oleh permintaan AS untuk narkotika Meksiko. Hanya atas dasar prinsip tanggung jawab bersama, kerja tim, dan rasa saling percaya, Meksiko dapat mengatasi tantangan ini.

Lalu Donald Trump dalam akun Twitternya membuat tweet mengenai hal Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Ia menegaskan kembali ancaman yang ia keluarkan awal tahun 2017 bahwa kesuksesan negosiasi ulang NAFTA kemungkinan bergantung pada langkah Meksiko dalam mengupayakan mengamankan sisi perbatasannya. Hampir sepanjang 2017 Gedung Putih melempar gagasan untuk menerapkan pajak yang disesuaikan di perbatasan terhadap barang-barang Meksiko. Usulan tersebut ditolak Kongres, sebelum akhirnya benar-benar dibatalkan saat pembahasan reformasi pajak (CNBC, 2018). Kementerian Meksiko juga bereaksi terhadap tweet Trump yang berbeda tentang NAFTA. Meksiko mengatakan posisinya di meja perundingan "serius dan konstruktif" dan mencari hasil kemenangan untuk Meksiko, AS, dan Kanada. Meksiko tidak akan merundingkan NAFTA atau aspek lain dari hubungan bilateral melalui media sosial atau media.

Banyak orang Meksiko masuk ke AS karena dilatarbelakangi oleh sejarah yaitu Perjanjian Guadalupe Hidalgo, yang ditandatangani pada 2 Februari 1848 tentang mengakhiri perang antara AS dan Meksiko. Menurut ketentuannya, Meksiko menyerahkan 55 persen wilayahnya, termasuk negara bagian California, Nevada, Utah, New Mexico, sebagian besar Arizona dan Colorado, dan sebagian Oklahoma, Kansas, dan Wyoming. Meksiko juga melepaskan semua klaim atas Texas, dan mengakui Rio Grande sebagai batas selatan dengan AS (National Archives, 2022). Faktor ekonomi juga mempengaruhi, dikarenakan mereka pergi ke AS untuk menemukan taraf hidup yang sejahtera daripada di Meksiko dan dibayar dengan upah mata uang dollar yang lebih bernilai dibandingkan peso. Negara mereka tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan kurang dan ini berakibat terjadinya imigrasi ke AS. Hal ini yang kemudian mendorong peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian "bagaimana kebijakan Presiden Donald Trump dalam program pembangunan tembok pembatas sebagai upaya mencegah *immigrant illegal & narcotics smuggling* 2017 - 2020?"

## **Pembahasan**

Fenomena beserta studi terdahulu telah dipaparkan oleh penulis yaitu tentang pencegahan imigran ilegal dan penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Penelitian ini berbeda dengan beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan. Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dalam program tembok pembatas sebagai upaya mencegah *immigrant illegal* dan *narcotics smuggling* asal Meksiko.

Presiden Donald Trump mempunyai peran penting dalam membuat kebijakan keamanan negaranya melindungi dari bahaya luar seperti pada kampanye yang selalu menggunakan kata-kata "*Make America Great Again*." Presiden Trump menjalankan politik luar negerinya sebagai tujuan keamanan nasional AS. Peran Presiden mempunyai tanggung jawab mengambil segenap tindakan dan memiliki hak bertujuan menjaga kepentingan negara. Presiden AS dalam mengeluarkan doktrin melakukan analisis, diagnosis dan kajian dalam konteks politik luar negeri terhadap lingkup eksternal demi menjaga kepentingan internalnya. Pemerintahannya mengutamakan keselamatan, kepentingan dan kesejahteraan warga negara AS. selanjutnya membangun kembali militer, mempertahankan perbatasan, melindungi kedaulatan, dan memajukan nilai-nilai. AS menghadapi dunia yang luar biasa berbahaya penuh dengan berbagai ancaman yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir (White House, 2017).

Di dalam negeri, perbatasan yang lemah dan undang-undang imigrasi yang tidak ditegakkan telah menciptakan sejumlah kerentanan. Kartel kriminal membawa narkoba dan bahaya ke dalam komunitas AS. Terlalu banyak orang Amerika yang kehilangan kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada masa depan, dan kepercayaan pada nilai-nilai. Presiden telah memulihkan kepercayaan pada tujuan Amerika dan berkomitmen kembali pada prinsip-prinsip pendirian dan pada nilai-nilai yang telah membuat keluarga, komunitas, dan masyarakat AS begitu sukses. oleh karena itu pekerjaan datang kembali dan ekonomi AS tumbuh serta dapat melakukan investasi bersejarah di militer AS dan menegakkan perbatasan (White House, 2017).

Strategi keamanan nasional administrasi Presiden Donald Trump memaparkan visi strategis untuk "*protect the American people, the homeland, and the American way of life*" mempromosikan kemakmuran, memelihara perdamaian melalui kekuatan, dan memajukan pengaruh Amerika di dunia. Pemerintahan Donald Trump akan mengejar visi yang indah ini sebuah dunia bangsa yang kuat, berdaulat, dan mandiri, masing-masing dengan budaya dan mimpinya sendiri, berkembang berdampingan dalam kemakmuran, kebebasan, dan perdamaian sepanjang tahun mendatang.

Pemerintahan Donald Trump akan mempromosikan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan AS tidak akan pernah melupakan nilai-nilai dan kapasitasnya untuk menginspirasi, mengangkat, dan memperbaiki. Terpenting bagi pemerintahan Presiden Donald Trump akan melayani rakyat Amerika dan menjunjung tinggi hak mereka atas pemerintahan yang memprioritaskan keamanan, kemakmuran, dan kepentingan nasional mereka. Kebijakan keamanan yang dibuat presiden kemampuan melindungi bangsa mencakup nilai-nilai internalnya dari pihak luar berupa ancaman merupakan keamanan nasional (Berkowitz, 1965). Keamanan nasional berperan paling penting batas negara menentukan kedaulatan mempunyai peranan dalam politik luar negeri upaya membentuk tata interaksi antarnegara bermanfaat mencakup area geografis. Keamanan nasional berkaitan dengan efektivitas politik luar negeri dan kedaulatan teritorial yang diperankan negara yaitu strategi keamanan nasional "*American First*."

*Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok  
Pembatas Sebagai Upaya Mencegah Immigrant Illegal & Narcotics Smuggling  
Asal Meksiko (2017 - 2020)*

Strategi keamanan nasional *American First* didasarkan pada prinsip-prinsip Amerika, penilaian yang jelas terhadap kepentingan AS, dan tekad untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini merupakan perspektif dari realisme bahwa AS sebagai pelaku utama yang menempatkan isu keamanan nasional menjadi pilar utama dalam strategi keamanan nasionalnya yang menjaga perbatasan dari krisis para imigran asal Meksiko. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bergantung pada negara-negara yang kuat dan berdaulat yang menghormati warganya di dalam negeri dan bekerja sama untuk memajukan perdamaian di luar negeri. Itu membumi dalam kesadaran bahwa prinsip-prinsip Amerika adalah kekuatan abadi untuk kebaikan di dunia (White House, 2017). *American First* secara aktif membagi *audiens* untuk keuntungan politik melalui serangkaian narasi yang saling terkait yang menyalahkan ancaman eksistensial yang dihadapi bangsa dengan 'musuh rakyat' internal dan eksternal (Löfflmann, 2021: 543).

Negara merupakan aktor dan keputusan luar negeri hanya mengakui "negara" sebagai satu-satunya entitas. Kepentingan nasional tak lain adalah kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan. Perilaku negara dalam Hubungan Internasional untuk menjaga agar elemen-elemen kekuatan yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional tetap seimbang (Burchill, 2005).

upaya melindungi kedaulatan Amerika dengan mempertahankan institusi, tradisi, dan prinsip ini yang memungkinkan hidup dalam kebebasan, untuk membangun bangsa yang dicintai. Menghargai warisan nasional, karena lembaga pemerintah republik yang langka dan rapuh hanya dapat bertahan jika ditopang oleh budaya yang menghargai lembaga-lembaga tersebut. Kebebasan dan kemerdekaan telah memberikan masyarakat berkembang yang dinikmati orang Amerika saat ini sebagai bangsa yang bersemangat dan percaya diri, menyambut ketidaksepakatan dan perbedaan, tetapi disatukan oleh ikatan sejarah, budaya, kepercayaan, dan prinsip yang menentukan identitas Amerika.

Komponen kunci dari narasi keamanan dalam proses pembentukan identitas dan orientasi penonton ini adalah antagonisme dasar dari 'pahlawan' dan 'penjahat' dari cerita bahwa konsep keamanan nasional terkait dengan penonton, dan (Löfflmann, 2021: 547) yang telah membentuk bagian penting dari retorika presidensial yang berpusat pada keamanan di AS. Penataan naratif atas realitas ini pada gilirannya membentuk rasa memiliki nasional dan landasan historis sebagai keamanan ontologis pada khalayak (Löfflmann, 2021: 548).

*National Security Strategy* (NSS) mencerminkan lebih dari sekadar presiden. Ini mencerminkan kepentingan dan pengaruh pembentukan kebijakan luar negeri AS yang luas meliputi Gedung Putih, Departemen Pertahanan, negara bagian, keamanan dalam negeri, keuangan, perdagangan, Kesehatan dan layanan kemanusiaan, badan intelijen dan komite kongres (Ettinger, 2018: 476). Latar belakang dan kepribadian presiden sangat menentukan bagaimana kebijakan luar negeri dan isu-isu keamanan dianalisis dan diputuskan. Nilai-nilai Amerika dan kepentingan keamanan saling terkait dan tak terpisahkan memajukan demokrasi dan hak asasi manusia sangat penting untuk mengamankan AS. Selain itu, beberapa faktor lain menunjukkan bahwa Departemen Pertahanan akan memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS di tahun-tahun mendatang (Brooks, 2017).

Wilayah perbatasan di AS paling aman ketika menggunakan pendekatan seluruh pemerintah yang memanfaatkan antarlembaga dan kemitraan internasional sebagai kekuatan pengali. Patroli perbatasan adalah peserta aktif dalam kampanye perbatasan dan pendekatan selatan DHS, dan memiliki peran dalam satuan tugas gabungan barat, operasional terpadu pendekatan untuk mengatasi ancaman kejahatan transnasional organisasi di sepanjang dan mendekati perbatasan barat daya. Ini upaya mengarahkan sumber daya DHS dalam cara yang jauh lebih kolaboratif mode untuk mengatasi berbagai ancaman yang luas dan kompleks dan tantangan, termasuk migrasi ilegal; penyelundupan ilegal perdagangan narkoba, manusia dan senjata; pembiayaan gelap semacam itu operasi; dan ancaman eksploitasi teroris di perbatasan kerentanan (Govinfo, 2016).

Upaya memperkuat kontrol atas perbatasan dan sistem imigrasi adalah inti dari keamanan nasional, kemakmuran ekonomi, dan supremasi hukum. Tindakan tambahan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan memulihkan integritas sistem imigrasi AS (Govinfo, 2019).

#### *Meningkatkan Keamanan Perbatasan*

Mengamankan perbatasan melalui pembangunan tembok perbatasan, penggunaan pertahanan berlapis dan teknologi canggih, penggunaan personel tambahan, dan tindakan lainnya. AS Pemerintah akan bekerja dengan mitra asing untuk mencegah, mendeteksi, dan mengganggu individu yang mencurigakan jauh sebelum mereka memasuki AS.

Sebagaimana dicatat dalam Proklamasi 9822 dan 9842 pada 9 November 2018 dan 7 Februari 2019, sistem imigrasi dan suaka AS berada dalam krisis sebagai konsekuensi dari migrasi massal alien melintasi perbatasan selatan AS. Dalam Proklamasi 9844 tanggal 15 Februari 2019, Presiden Donald Trump menyatakan keadaan darurat nasional untuk mengatasi krisis keamanan dan kemanusiaan di perbatasan itu. Keadaan darurat itu terus berkembang semakin parah. Banyak alien bepergian dengan karavan besar atau kelompok terorganisir besar lainnya, dan banyak yang bepergian dengan anak-anak.

Sesuai dengan arahan presiden, *Department of Defense* (DOD) mendukung CBP dalam misi keamanan perbatasan barat daya pada April 2018, mengirim personel dari komponen aktif dinas militer, dan gubernur negara bagian dengan persetujuan Menteri Pertahanan mengaktifkan anggota dari mereka Garda Nasional masing-masing menjadi gelar 32, Kode AS, status tugas. Menteri Pertahanan telah menyetujui pemberian dukungan DOD hingga setidaknya 30 September 2021. Menurut pejabat OUSD (Kebijakan), DOD dalam konsultasi dan koordinasi dengan gubernur negara bagian pengirim anggota Garda Nasional, awalnya menugaskan 782 anggota Garda, yang telah mengajukan diri, untuk mendukung operasi perbatasan barat daya CBP. Antara April 2018 dan Agustus 2020, sebanyak 2,579 anggota Garda Nasional dari 34 negara bagian dan teritori dikirim oleh DOD ke empat negara bagian perbatasan Texas, New Mexico, Arizona, dan California untuk mendukung misi CBP ini. Selain itu, pada November 2018, DOD mengirimkan 5.815 personel komponen aktif untuk mendukung CBP dalam mengantisipasi sejumlah besar warga negara asing yang tiba di perbatasan barat daya. Personel ini berasal dari berbagai jenis unit, termasuk Brigade Infanteri Angkatan Darat, Brigade Penerbangan Tempur, dan Batalyon Infanteri Korps Marinir (GAO, 2021).

*Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok  
Pembatas Sebagai Upaya Mencegah Immigrant Illegal & Narcotics Smuggling  
Asal Meksiko (2017 - 2020)*

*Meningkatkan Pemeriksaan*

Pemerintah AS akan meningkatkan pemeriksaan calon imigran, pengunjung, dan pengunjung asing lainnya untuk mengidentifikasi individu yang mungkin menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik. Pemerintah akan menetapkan standar keamanan yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa kami menjauhkan orang-orang berbahaya dari AS dan meningkatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk mengidentifikasi mereka yang mungkin sudah berada di dalam perbatasan.

Dalam Perintah Eksekutif 13780 tanggal 6 Maret 2017 (Melindungi Bangsa dari Teroris Asing Masuk ke AS), sementara menangguhkan masuknya warga negara dari negara tertentu tertentu dan memerintahkan peninjauan di seluruh dunia apakah AS akan memerlukan informasi tambahan dari setiap negara asing untuk menilai secara memadai apakah warga negara dari negara asing tersebut ingin memasuki AS menimbulkan ancaman keamanan atau keselamatan publik bagi AS, dan jika demikian informasi tambahan apa yang diperlukan. Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, sesuai dengan Perintah Eksekutif 13780 dan berkonsultasi dengan Sekretaris Negara dan Direktur Intelijen Nasional, mengembangkan model penilaian menggunakan tiga kategori kriteria untuk menilai ancaman keamanan nasional dan keselamatan publik: apakah pemerintah asing terlibat dalam praktik manajemen identitas yang andal dan berbagi informasi yang relevan; apakah pemerintah asing berbagi informasi keamanan nasional dan keselamatan publik; dan apakah suatu negara sebaliknya menimbulkan risiko keamanan nasional atau keselamatan publik (Govinfo, 2020).

Protokol dan prosedur pemeriksaan yang ditingkatkan untuk visa dan manfaat imigrasi lainnya. Sekretaris Negara dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, dengan berkonsultasi dengan Jaksa Agung, akan, sebagaimana diizinkan oleh hukum, menerapkan protokol dan prosedur sesegera mungkin yang menurut penilaian mereka akan meningkatkan penyaringan dan pemeriksaan aplikasi untuk visa dan semua lainnya. manfaat imigrasi, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan rakyat Amerika. Protokol dan prosedur tambahan ini harus fokus pada (White House, 2017).

1. mencegah masuknya warga negara asing ke Amerika Serikat yang dapat membantu, mendukung, atau melakukan tindakan kekerasan, kriminal, atau teroris; dan
2. memastikan pengumpulan yang tepat dari semua informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi secara ketat semua alasan tidak dapat diterima atau dideportasi, atau alasan penolakan manfaat imigrasi lainnya.

Dalam metodologi yang diperbarui ini, keseluruhan kriteria umum untuk peninjauan tidak berubah. Itu dengan menggunakan proses peninjauan yang disempurnakan ini, DHS melakukan peninjauan terbaru di seluruh dunia sesuai dengan Proklamasi 9645 antara Maret 2019 dan September 2019. Prosesnya dimulai pada Pemerintah AS masih mengharapkan semua pemerintah asing untuk berbagi informasi manajemen identitas yang diperlukan, untuk berbagi informasi keamanan nasional dan keselamatan publik, dan untuk lulus penilaian risiko keamanan dan keselamatan publik.



### *Penegakan Hukum Imigrasi*

Pemerintah AS akan menegakkan undang-undang imigrasi, baik di perbatasan maupun di pedalaman, untuk memberikan pencegah yang efektif terhadap imigrasi ilegal. Ketakutan dan penghapusan cepat orang asing ilegal di perbatasan sangat penting untuk strategi keamanan perbatasan yang efektif. Petugas patrol juga harus meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan melawan penipuan dalam proses imigrasi, yang merusak integritas sistem imigrasi, mengeksploitasi individu yang rentan, dan menciptakan risiko keamanan nasional.

Dalam 100 hari sejak Presiden Donald J. Trump menandatangani *Executive Orders* (EOs) mengenai prioritas penegakan imigrasi, *US Immigration and Customs Enforcement* (ICE) telah menangkap lebih dari 41.000 orang yang diketahui atau diduga berada di negara tersebut secara ilegal. Hal ini mencerminkan peningkatan sebesar 37,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Antara 22 Januari dan 29 April 2017, petugas deportasi ICE *Enforcement and Removal Operations* (ERO) secara administratif menangkap 41.318 orang atas tuduhan imigrasi sipil. Antara 24 Januari dan 30 April 2016, ERO menangkap 30.028 (ICE, 2021). Hal ini mencerminkan komitmen Presiden Trump untuk menegakkan hukum imigrasi secara adil dan menyeluruh. Agen dan petugas ICE telah diberikan arahan yang jelas untuk fokus pada ancaman terhadap keselamatan publik dan keamanan nasional, yang telah mengakibatkan peningkatan substansial dalam penangkapan orang asing kriminal yang dihukum. Namun, ketika kami bertemu orang lain yang berada di negara ini secara tidak sah, kami akan menjalankan kewajiban kami dan menegakkan hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh data, ICE terus menjalankan misi secara profesional dan sesuai dengan hukum, dan komunitas akan jauh lebih aman karenanya.

### **Kesimpulan**

Hasil temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isu imigran ilegal dan penyeludupan narkoba merupakan masalah pilar utama dalam kebijakan Donald Trump dan menjadi fokus serius karena isu tersebut mengganggu stabilitas keamanan nasional dan terjadinya krisis di perbatasan AS-Meksiko. Peneliti menggunakan pendekatan realisme karena keamanan nasional menjadi isu utama. Doktrin Trump berpengaruh besar pada kebijakan luar negeri AS tindakan kebijakan untuk memecahkan masalah perubahan lingkungan di perbatasan selatan AS-Meksiko adalah dengan dibuatnya EO 13767 program pembangunan tembok pembatas selatan AS-Meksiko, memo presiden dan proklamasi untuk mencegah imigran ilegal dan penyelundupan obat-obatan terlarang. Meksiko mengirim orang-orang jahat dan sedikit orang baik ke AS.

Warga negara Meksiko tidak mendukung adanya tembok pembatas sebab itu menyerang orang Meksiko dan meninggalkan statuta kebebasan AS. Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto kembali menegaskan posisinya tidak akan membayar pembangunan tembok perbatasan yang diusulkan Presiden Donald Trump. Selama program pembangunan Trump membuat pernyataan bahwa Meksiko yang akan membayar tembok pembatas tersebut. Ini menimbulkan reaksi terhadap Meksiko yang tidak akan membayar tembok pembatas tersebut dan berdampak pada *North American Free Trade Area* (NAFTA). Donald Trump menegaskan kembali ancaman yang ia keluarkan awal tahun bahwa kesuksesan negosiasi ulang NAFTA bergantung pada langkah Meksiko dalam mengupayakan mengamankan sisi perbatasannya. Gedung Putih melempar gagasan untuk menerapkan pajak yang disesuaikan di perbatasan terhadap barang-barang Meksiko. Usulan tersebut ditolak Kongres, sebelum akhirnya benar-benar dibatalkan saat pembahasan reformasi pajak.

*Kebijakan Presiden Donald Trump dalam Program Pembangunan Tembok Pembatas Sebagai Upaya Mencegah Immigrant Illegal & Narcotics Smuggling Asal Meksiko (2017 - 2020)*

Pembangunan tembok pembatas di sepanjang perbatasan selatan AS - Meksiko setinggi 18 - 30 kaki dan lebih dari 2.000 mil area yang di lewati tembok mengalami penurunan penyebrangan ilegal sebesar 84 persen. Tembok dibangun dengan bahan-bahan beton dan baja, terlebih lagi tembok pembatas itu sudah di uji sebelumnya, desain tembok dan warna menjadi pemilihan dimana tembok itu cocok untuk dipasang sesuai medan area. Jumlah petugas perbatasan dikerahkan mengamankan perbatasan sekitar 5.000 agen *National Guard* yang berjaga. Tembok pembatas sudah dipasang sensor kamera dapat memantau para imigran. CBP menemukan terowongan penyelundupan terpanjang. Strategi Donald Trump dalam mengamankan perbatasan untuk mencegah obat-obatan terlarang dan menurunkan kasus opiod nasional di AS.

## Referensi

- Anton, Michael. (2019, 20 April). "The Trump Doctrine." <https://foreignpolicy.com/2019/04/20/the-trump-doctrine-big-think-america-first-nationalism/>
- Berkowitz, dkk. (1965). *American National Security*. New York: Free Press.
- Brooks, Risa A. (2017, 3 Juli). "Donald Trump's National Security Process: Implications for U.S Foreign Policy and International Relations." <https://trendsresearch.org/wp-content/uploads/2020/01/Brooks-National-Security-Establishment-Working-Paper-July-2017.pdf>
- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Chishti, Muzaffar & Jessica Bolter. (2020, 20 November). "The Trump Effect on Legal Immigration Levels: More Perception Than Reality." <https://www.migrationpolicy.org/article/trump-effect-immigration-reality>
- CNN. (2017, 28 Agustus). "In Response to Trump Tweet, Mexico Reiterates it Won't Pay For The Wall." <https://edition.cnn.com/2017/08/27/politics/mexico-border-wall-trump-tweet/index.html> 022
- Destradi, Sandra & Johannes Plagemann. (2019). "Populism and International Relations: (Un)predictability, personalisation, and the reinforcement of existing trends in world politics." 45(5).
- Ettinger, Aaron. (2018). "Trump's National Security Strategy: "America First" Meets The Establishment." 73(3).
- GAO. (2021, 2 Februari). "Southwest Border Security." <https://www.gao.gov/assets/gao-21-356.pdf>
- Govinfo. (2016, 23 Maret). "National Security: Threats At Our Borders." <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-114hhrg23641/html/CHRG-114hhrg23641.htm>
- Govinfo. (2019, 29 April). "Memorandum on Additional Measures To Enhance Border Security and Restore Integrity to Our Immigration System." [https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201900251/pdf/DCPD-201900251.pdf?ct=t\(AgencyUpdate\\_020320\)](https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201900251/pdf/DCPD-201900251.pdf?ct=t(AgencyUpdate_020320))
- Govinfo. (2020, 31 Januari). "Proclamation 9983 Improving Enhanced Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted Entry Into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats." <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202000052/pdf/DCPD-202000052.pdf>
- Holsti, K.J. (1967). *International Politics A Framework for Analysis*, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- ICE. (2021, 10 Juli). "ICE ERO Immigration Arrests Climb Nearly 40%." <https://www.ice.gov/features/100-days>

- Kolås, Åshild & Lacin Idil Oztig. (2021, 21 Maret). "From Towers to Walls: Trump's Border Wall as Entrepreneurial Performance." SAGE Journal, Spring.  
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23996544211003097>
- Lacatus, Corina. (2020). "Populism and President Trump's Approach to Foreign Policy: An Analysis of Tweets and Rally Speeches." 41(1).
- National Archives. (2022, 9 Juni). "Treaty of Guadalupe Hidalgo."  
<https://www.archives.gov/milestone-documents/treaty-of-guadalupe-hidalgo>
- Owens, Mackubin Thomas. (2008). "The Bush Doctrine: The Foreign Policy of Republican Empire." 53(1).
- Politifact. (2011, 11 Mei). "Obama Says The Border Fence is 'Now Basically Complete'."  
<https://www.politifact.com/factchecks/2011/may/16/barack-obama/obama-says-border-fence-now-basically-complete/>
- The White House. (2017, 24 September). "President Donald J. Trump Strengthens Security Standards For Traveling to America."  
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-strengthens-security-standards-traveling-america/>
- Volpp, Leti. (2016). "Immigrants Outside the Law: President Obama, Discretionary Executive Power, and Regime Change." 3(2).
- Waslin, Michele. (2020). "The Use of Executive Orders and Proclamations to Create Immigration Policy: Trump in Historical Perspective." 8(1).